



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JL. TANJUNG API NO. 7 TELP. (0451) 421954 PALU

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

BAKESBANGPOL

PROV. SULTENG

2025-2029



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR **25** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

a. Bab I PENDAHULUAN

Memuat :

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :

- a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
- c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelompok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).

2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :

- a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b) Isu strategis.

c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

Memuat :

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat :
1. Uraian Program;
 2. Uraian Kegiatan;
 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- e. Bab V PENUTUP
Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai pedoman perencanaan strategis lima tahunan yang selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu **"Berani Wujudkan Sulawesi Tengah Maju dan Berkelanjutan"**. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah guna mendukung terciptanya stabilitas politik, ketahanan ideologi, dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, penyajian visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup yang akan dilaksanakan selama periode 2025–2029. Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan dinamika sosial-politik, tantangan global dan nasional, serta aspirasi masyarakat daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Palu, 02 September 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F A N, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19710909 199012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	11
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ..	11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	11
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	49
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	50
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah	50
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	53
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	66
Gambar 3.1 Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	68
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.....	70
2025 -2029.....	70
Tabel 3.1	70
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah	71
Tabel 3.2	73
BAB IV	78
PROGRAM, KEGIATAN, SUB.KEGIATAN, DAN KINERJA	78
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
4.1 Rumusan Program, Kegiatan, Sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulteng.....	78
4.2 Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulteng	100
4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	105
4.3 Kinerja Penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulteng	144
BAB V PENUTUP	149

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Pegawai Bakebangpol Prov. Sulteng Menurut Pendidikan	26
Tabel 2.2	Daftar Pegawai Bakebangpol Prov. Sulteng Menurut Kepangkatan	27
Tabel 2.3	Daftar Sarana dan Prasarana	27
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakebangpol Prov. Sulteng Politik Daerah Tahun 2016-2021	32
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bakebangpol Prov. Sulteng Tahun 2016-2021	35
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Bakebangpol Prov. Sulteng Periode 2021-2026	57
Tabel 3.2	Telaahan Visi dan Misi, KDH/WKDH	59
Tabel 3.3	Telaahan Tujuan /Sasaran K/L	61
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bakebangpol Prov. Sulteng	74
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bakebangpol Prov. Sulteng Tahun 2021-2026	70
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bakebangpol Prov. Sulteng Tahun 2021-2026	76
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bakebangpol Prov. Sulteng Periode 2021-2026	81
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bakebangpol Prov. Sulteng Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Sulteng	93
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Procinsi Sulawesi Tenga	10
Gambar 4.1 Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dilandasi oleh kebutuhan akan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, serta prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 serta Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja dan Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran berpedoman pada Rencana Strategis yang disusun untuk kurun waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Rencana Strategis yang akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi yang mendasari penyusunan Renstra ini antara lain adalah Dinamika lingkungan strategis global, nasional, dan regional yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, demokratisasi, keterbukaan ruang publik, serta meningkatnya potensi kerawanan sosial, politik identitas, radikalisme, dan ancaman terhadap persatuan bangsa, Tuntutan pembangunan daerah yang menempatkan aspek stabilitas politik, ketahanan ideologi, integrasi bangsa, serta harmonisasi hubungan antar komponen masyarakat sebagai prasyarat tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan serta Kebutuhan penguatan kelembagaan dan kapasitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah yang berperan strategis Dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri, Wawasan Kebangsaan, dan Pemantapan Ketahanan Nasional Di Daerah. Nilai Strategis Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 terletak pada fungsinya sebagai instrumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah dan pedoman kerja, menjadi alat pengendali, monitoring, dan evaluasi kinerja, wadah integrasi kebijakan pusat dan daerah, dasar

akuntabilitas publik serta transparansi kinerja, sekaligus sarana adaptasi terhadap dinamika sosial, politik, dan keamanan guna menjaga ketahanan ideologi, politik, serta Persatuan Bangsa di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah dan renstra perangkat daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah³ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23

tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaga negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5679) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6764);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah daerah Dalam Rangka Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Renja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri⁵ Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika.
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
43. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/7764/SJ dan 050.12/7765/SJ tanggal 10 Oktober Tahun 2017 tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
44. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4789 tanggal 26 November 2012 tentang Pemantapan Ketahanan⁶ Ekonomi Di Daerah.
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141);
47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161).
48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lebih terarah, terukur, terpadu, serta sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah maupun nasional.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman strategis bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program kerja yang jelas, terukur, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Menyelaraskan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan arah Pembangunan Nasional dan daerah melalui keterpaduan RPJMN, RPJMD, serta kebutuhan dan potensi daerah di bidang Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Ideologi, Dan Kewaspadaan Nasional.
3. Menjadi acuan operasional bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun stabilitas politik, ketahanan ideologi, serta kondusivitas wilayah demi mendukung pembangunan daerah.
4. Menjadi dasar dalam evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah agar capaian program dapat diukur secara akuntabel, transparan, dan berkesinambungan.
5. Memberikan arah dan kerangka strategis dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga selaras dengan sasaran RPJMD, sehingga perencanaan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik berjalan harmonis dan terintegrasi.
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mendukung penyusunan RKPD dan APBD Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, serta transparansi dalam penyelenggaraan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta mendorong

partisipasi mitra pembangunan, termasuk organisasi masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Bab ini memuat Gambaran Pelayanan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Tujuan dan sasaran. Strategi, Arah Kebijakan dan memuat tentang uraian strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran, arah kebijakan yang terukur melalui target capaian indikator kinerja.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat bahasan tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, Indikator Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan, Target dan pagu indikatif Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan Tahun 2025-2029, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK);

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari Upaya pencapaian sasaran Pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris Membawahi :
 - 1. Sub. Bag. Keuangan dan Asset;
 - 2. Sub. Bag. Kepegawaian dan Umum ; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Politik;
- d. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- e. Bidang Kewaspadaan;
- f. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi setiap unsur dalam Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pemberian bahan perizinan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- c. pelaksanaan tugas lain di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan oleh Gubernur.

2) **Sekretaris**

Sekretariat yang dipimpin Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di lingkungan Badan. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan asset;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bagian yaitu :

(1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan asset. Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset meliputi ;

- a) mengelola administrasi Sub Bagian Keuangan dan Asset;
- b) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
- c) menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset;
- d) menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- e) melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
- f) melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;

- g) mengelola tata usaha keuangan dan asset;
- h) penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- i) menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan asset;
- j) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset; dan
- k) menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset dan Badan.

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga. Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Meliputi:

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b) menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c) melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Badan;
- d) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e) melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- f) melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h) melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i) melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- j) melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

- k) melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l) melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
- n) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Badan.

3) BIDANG POLITIK

Bidang Politik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembinaan Politik. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang politik;
- b. perumusan kebijakan di bidang Politik;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Politik;
- d. pembinaan/bimbingan teknis di bidang Politik;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Politik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang politik

4) BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. perumusan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. pembinaan/bimbingan teknis di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

5) BIDANG KEWASPADAAN

Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kewaspadaan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kewaspadaan mempunyai fungsi :

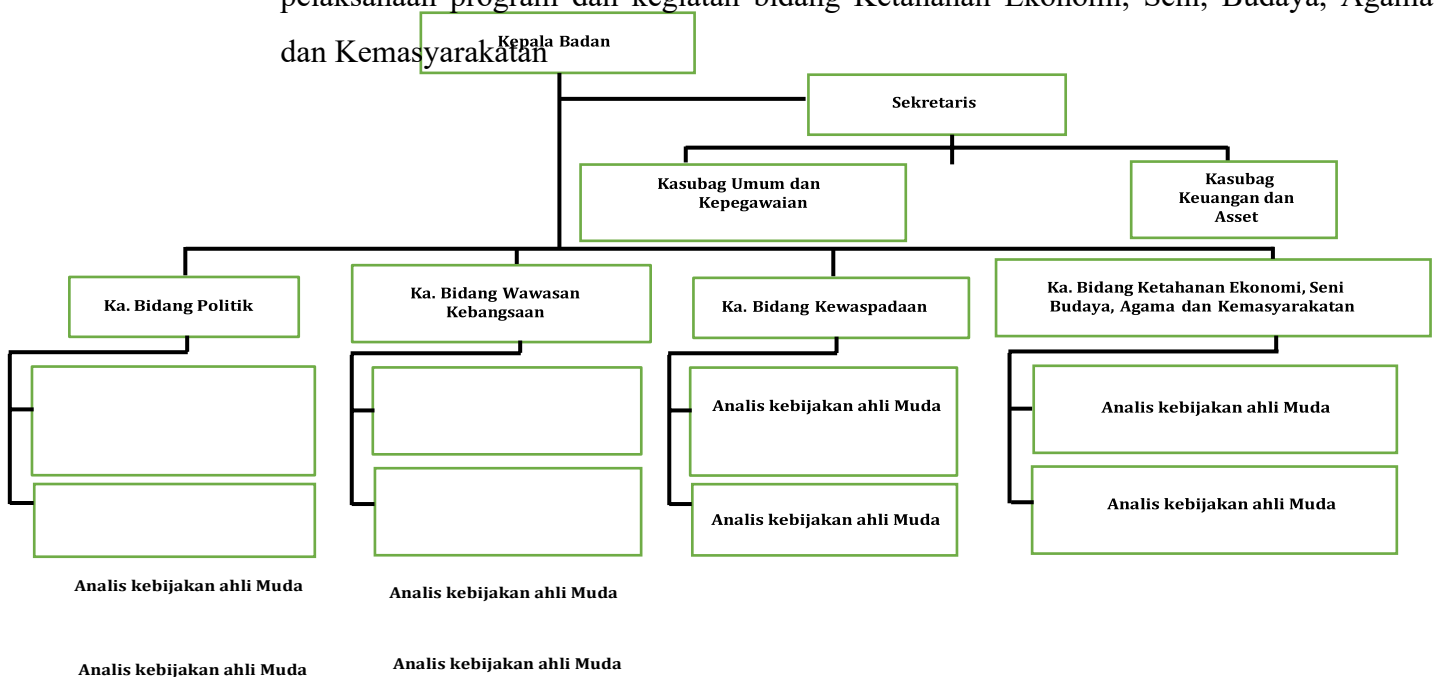
- a. penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi di bidang Kewaspadaan;
- b. perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan;
- d. pembinaan/bimbingan teknis di bidang Kewaspadaan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kewaspadaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;
- g. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kewaspadaan.

6) BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

mempunyai fungsi :

- penyusunan program operasional dan pengelolaan administrasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- pembinaan/bimbingan teknis di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah dan status kepegawaian

Jumlah Pegawai dan status Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai Bulan September 2025 sebanyak 113 orang, Jumlah tersebut terdiri dari 71 orang ASN (PNS 42 orang dan PPPK 29 orang), 42 orang Tenaga Kontrak (Non ASN). Dari 113 orang pegawai tersebut, sebanyak 64 orang laki-laki dan 49 orang perempuan.

b. Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 10 orang berpendidikan strata 2 (pasca sarjana), 22 orang berpendidikan strata 1 (sarjana), 1 orang berpendidikan Diploma III, 9 orang berpendidikan SLTA.

Tabel 2.1

**Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Pendidikan
(Data Bulan September 2025) :**

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 3	-
Strata 2	10
Strata 1	22
Diploma 3	1
SLTA	9
Total	42

c. Golongan Kepegawaian

Sedangkan berdasarkan Gol. Kepegawaian, dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Gol. II 9 orang; Gol. III 22 orang ; Gol. IV 11 orang

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Menurut kepangkatan
 (Data Bulan September 2025) :

Pangkat/golongan	Jumlah
Golongan I	-
Golongan II	9
Golongan III	22
Golongan IV	11
Total	42

2. Asset/Modal OPD

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari :

Tabel 2.3
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
 (Data Bulan September 2025) :

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
1	Bangunan Gedung	1 Gedung
	Alat-alat Angkutan	
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	14 Unit
2	Pick Up	1 unit
3	Sepeda Motor	31 unit
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
1	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1 buah
2	Lemari Besi	10 buah
3	Filling Besi/Metal	4 buah
4	Brand Kas	3 buah
5	Lemari kayu	3 buah
6	Mesin Absensi	1 buah
7	Alat Kantor Lainnya	1 buah
8	Kursi Besi/Metal	21 buah
9	Meja Rapat	17 buah
10	Kursi Rapat	90 buah
11	Kursi Tamu	4 buah
12	Meja Komputer	2 buah
13	Tenda	2 buah
14	Meja Biro	38 buah
15	Sofa	2 buah
16	Kursi Kerja	28 buah
17	Gordyn	60 buah
18	Karpet	2 buah
19	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2 buah
20	Lemari Es	1 buah
21	AC Split	21 buah
22	Dispenser	14 buah
23	Televisi	6 buah
24	Loudspeaker	2 Buah
25	Sound System	1 Buah
26	Dispenser	1 Buah
27	Handy Cam	1 Buah
28	Tripot Speaker	2 buah
29	P.C Unit/ Komputer PC	22 buah
30	Laptop	10 buah
31	Note Book	17 buah
32	Printer	13 buah
33	Scanner	6 buah
34	Harddisk Internal	1 buah
35	Harddisk Eksternal	1 Buah
36	Speaker Aktive Komputer	2 Buah
37	Power Supply	2 Buah
38	Wireless Lan (USB)	1 Buah

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 Buah
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7 Buah
42	Meja Operator	3 Buah
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11 Buah
46	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10 Buah
47	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	1 Buah
48	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-lain	1 Buah
49	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3 Buah
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1	Proyektor + Attachment	2 Buah
2	Equalizer	1 Buah
3	Microphone/Wireless Mic	1 Buah
4	Microphone Table stand	2 Buah
5	Camera Electronic	3 Buah
6	Camera Film	1 Buah
7	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1 Buah
8	Facsimile	1 Buah
9	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	9 Buah
10	Alat Pemancar VHF/FM Lain- Lain	1 Buah
11	Antena VHF/FM Portable	2 Buah
12	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	22 Buah
	Alat Laboratorium	
1	Exhaust Fan	3 Buah
2	Kabel Listrik	1 Buah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan sejumlah layanan, baik

layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

a. Layanan Internal

- 1) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan Visi, Misi, Serta Prioritas Pembangunan Daerah;
- 2) Pengelolaan administrasi kelembagaan, keuangan, dan kepegawaian secara tertib, transparan, dan akuntabel;
- 3) Penguatan kapasitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, pembinaan disiplin, dan budaya kerja yang profesional;
- 4) Pelaksanaan koordinasi lintas bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan sinergi pelaksanaan tugas;
- 5) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta pelaporan kinerja kelembagaan secara berkala;

b. Layanan Eksternal

- 1) memberikan layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pendidikan Politik, Dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Kepada Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) memfasilitasi Partai Politik, mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, serta mendorong peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat;
- 3) memberikan layanan mediasi, fasilitasi, dan pembinaan kerukunan antarumat beragama serta pembinaan organisasi masyarakat agar tercipta keharmonisan sosial;
- 4) menyelenggarakan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ancaman dan konflik sosial, serta memberikan rekomendasi langkah antisipatif kepada pemerintah daerah
- 5) memberikan layanan legalisasi, verifikasi, pembinaan, dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan agar lebih berdaya guna dan berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah;

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran, ini dilakukan untuk melihat

tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2020-2024 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2020-2024
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Dokumen	-	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	-	1	1	1	1	1	-
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
8	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				Orang/Bulan	14	14	14	14	14	-	14	14	14	14	14	-	1	1	1	1	1	-
9	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Dokumen	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	1	1	1	1	1	-
10	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
13	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
14	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
15	Jumlah laporan Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
16	Jumlah Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah SKPD				Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik SKPD				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
18	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan bajrang milik daerah pada SKPD				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
20	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				Paket	2	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	-	1	1	1	1	1	
21	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				Paket	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
25	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Paket	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
26	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				Paket	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
27	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
28	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
29	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
30	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	Jumlah Paket Mebelyang Disediakan				Paket	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
33	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Unit	13	13	13	13	13	-	13	13	13	13	13	-	1	1	1	1	1	
34	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
35	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan				Laporan	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	1	1	1	1	1	
38	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
39	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
40	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				Unit	33	33	33	33	33	-	33	33	33	33	33	-	1	1	1	1	1	
41	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Unit	40	40	40	40	40	-	40	40	40	40	40	-	1	1	1	1	1	
42	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				Unit	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
43	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi				Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Jumlah dokumen program kerja di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang disusun				Dokumen	5	5	5	5	5	-	5	5	5	5	5	-	1	1	1	1	1	
45	Jumlah kebijakan teknis di bidang wawasan kebangsaan, bela negara, karakter kebangsaan, Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang di susun				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
46	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan				Orang	120	120	120	120	100	-	120	505	320	278	125	-	1	4.21	2.67	2.32	1.25	
48	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara karakter bangsa, pembauran kebangsaan Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan				Orang	150	150	150	150	150	-	150	-	-	150	150	-	1			1	1	
49	Jumlah Laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara karakter bangsa, pembauran kebangsaan Bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan				Laporan	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	2	-	1	1	1	1	0.5	
50	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan				Keluarga	50	50	50	50	50	-	50	-	-	50	50	-	1			1	1	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																						
51	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				Dokumen	5	5	5	5	5	-	5	5	5	4	2	-	1	1	1	1	1	
52	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
53	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				Orang	250	250	250	250	40	-	-	150	165	400	885	-	-	0.6	0.66	1.6	22.1	
54	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum				Orang	150	150	150	150	150	-	-	60	210	300	150	-	-	0.4	1.4	2	1	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																						
55	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				Laporan	4	4	4	4	4	-	4	1	4	4	4	-	1	4	1	1	1	
56	Jumlah Laporan Program kerja dibidang pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah yang di susun				Dokumen	4	4	4	4	4	-	1	2	4	4	4	-	4	2	1	1	1	
57	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah yang di susun				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
58	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah yang di susun				Orang	60	60	60	60	60	-	130	50	135	135	780	-	2.1	1,2	2,25	2.25	13	
59	Jumlah Orang Yang mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah				Orang	60	60	60	60	60	-	30	50	205	45	100	-	2	1,2	0,29	1,3	0,6	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	yang di susun																						
60	Jumlah Laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah yang di susun				Laporan	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	2	-	1	1	1	1	1	
61	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				Dokumen	3	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	-	1	1	1	1	1	
62	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				Dokumen	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	
63	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Orang	60	60	60	60	60	-	110	95	125	175	110	-	0.6	0,63	0,48	0,34	0,54	
64	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Orang	60	60	60	60	60	-	425	50	105	140	200	-	0,14	1,2	0,57	0,42	0,3	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
65	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Laporan	1	1	1	1	4	-	1	1	1	1	4	-	1	1	1	1	1	
66	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				Dokumen	5	5	5	5	5	-	5	5	5	4	5	-	1	1	1	1	1	
67	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				Dokumen	4	4	4	4	4	-	1	2	3	3	2	-	4	2	1,3	1,3	2	
68	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Orang	130	130	130	130	130	-	275	58	130	170	170	-	0,47	2,24	1	0,76	0,76	
69	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan				Orang	350	350	350	350	150	-	380	150	150	225	150	-	0,92	2,3	2,3	1,5	2,3	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																						
70	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Laporan	4	4	4	4	4	-	1	4	4	4	4	-	4	1	1	1	1	
71	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				Dokumen	4	4	4	4	4	-	1	1	4	1	1	-	4	4	1	4	4	

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah. Anggaran tersebut diperoleh setiap Tahun sesuai dengan Program/kegiatan yang telah ditetapkan per- Tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam Tabel 2.5 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2020-2024.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Periode 2020 – 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI *	-	8,936,182,134	8,717,980,000	11,858,681,872	12,041,467,879	-	-	7,964,155,238	8,617,980,000	8,851,689,917	10,479,105,628	-	-	0,89	0,98	0,74	0,87	-		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	140,571,000	151,266,703	567,107,100	472,898,200	-	-	134,764,000	151,166,703	562,584,198	389,145,210	-	-	0,95	1,00	0,99	0,82	-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.220.000	4,879,825	33,802,050	18,922,400,00	-	-	2,220,000	4,579,825	33,465,550	14,872,250	-	-	1,00	0,98	0,99	0,78	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.220.000	4,393,575	-	-	-	-	2,125,000	4,193,575	-	-	-	-	0,99	0,99	-	-	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	2.220.000	-	-	-	-	-	570,000	-	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	570.000	2,743,575	-	-	-	-	570.000	2,643,575	-	-	-	-	0,99	0,99	-	-	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	570.000	-	-	-	-	-	475.000	-	-	-	-	-	0,83	-	-	-	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	15,480,000	18,276,750	75,352,800,00	-	-	-	15,480,000	18,176,750	43,918,200	66,041,900	-	-	1,00	1,00	0,58	-	-		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	117,291,000	120,972,978	495,200,448	378,623,000,00	-	-	113,324,000	119,972,978	485,200,448	308,231,060	-	-	0,96	0,99	0,99	0,81	-		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	7,526,995,047	7,456,461,671	7,456,461,671	7,834,924,785	-	-	6,568,238,676	6,456,461,671	6,556,461,671	6,399,735,720	-	-	0,87	0,86	0,87	0,81	-		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	6,322,218,422	6,239,985,196	6,497,870,778	6,255,393,135,00	-	-	5,371,320,474	4,239,985,196	4,760,679,545	4,832,843,455	-	-	0,84	0,67	0,73	0,77	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1,183,190,000	1,147,200,000	1,232,475,000	1,491,155,000.00	-	-	1,175,331,577	1,137,200,000	1,221,858,000	1,480,840,000	-	-	0,99	0,99	0,99	0,99	-		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	5,816,625		-	-	-	-	5,816,625	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	760,000		-	-	-	-	760,000	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	10,000,000	58,918,000	63,860,000	88,376,650.00	-	-	10.000.000	58,918,000	62,722,480	86,052,265	-	-	1.00	1.00	0,98	0,97	-		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	2.200.000	-	3,926,400	-	-	-	2.200.000	-	3,737,200	-	-	-	1.00	-	0,95	-	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1.140.000	7,164,900	7,190,800	-	-	-	1.140.000	7,064,900	7,096,000	-	-	-	1.00	0,99	0,99	-	-		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1.650.000	3,193,575	3,486,400	-	-	-	1.650.000	3,193,575	3,297,200	-	-	-	100	1.00	0,94	-	-		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	40,553,000	60,276,150	113,701,800	129,962,800	-	-	40,450,000	59,276,150	110,756,686	120,922,911	-	-	1.00	0,98	0,97	0,93	-		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	2,125,000		-	-	-	-	2,125,000	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	475.000		6,986,400	1,436,150.00	-	-	475.000	-	4,524,700	-	-	-	1.00	-	0,64	-	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12.003.000	56,932,575	50,700,700	93,172,400.00	-	-	11.900.000	56,732,575	50,406,886	90,505,661	-	-	0.96	0.98	1.00	1.00	-		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	25.950.000	3,343,575	56,014,700	35,354,250.00	-	-	25.950.000	3,243,575	55,825,100	30,417,250	-	-	0.95	0.99	1.00	1.00	-		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	32.869.750	32,789,750	248,393,138	52,254,600	-	-	32.869.750	31,589,750	240,657,000	52,224,000	-	-	0.85	0.95	0.36	1.00	-		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	248,393,138	52,254,600	-	-	-	-	240,657,000	52,224,000	-	-	-	-	0.97	1.00	-		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	32.869.750	32,789,750	-	-	-	-	32.869.750	32,489,750	-	-	-	-	0.91	1.00	-	-	-		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	314.987.845	237,528,901	439,245,196	789,189,461	-	-	310.363.653	227,528,901	439,056,291	780,092,515	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	8.182.020	7,012,401	7,492,326	-	-	-	8.182.019	7,012,401	7,492,325	-	-	-	1.00	1.00	1.00	-	-		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	118,199,825	14,578,500	14,999,820	22,490,271.00	-	-	115.253.925	14,278,500	14,999,820	22,490,271	-	-	0.91	0.95	1.00	1.00	-		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	60.047.750	60,047,750	69,963,050	70,008,200.00	-	-	60.047.750	59,747,750	69,924,146	69,945,820	-	-	1.00	0.97	0.98	0.99	-		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	15.120.000	29,820,000	29,400,000	45,400,000.00	-	-	15.120.000	29,320,000	29,400,000	39,770,000	-	-	1.00	0.98	0.97	0.98	-		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	11.625.000	19,350,000	50,000,000	59,000,000.00	-	-	11.625.000	19,350,000	49,850,000	58,900,000	-	-	1.00	1.00	0.99	0.99	-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	101.813.25	106,720,250	267,390,000	592,290,990.00	-	-	100.134.959	106,720,250	267,390,000	588,986,424	-	-	0.98	1.00	0.99	0.98	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	169.242.875	100,980,000	1,767,476,098	1,530,332,100	-	-	168.685.000	99,780,000	1,738,300,000	1,513,240,000	-	-	0.98	0.99	0,98	0,98	-		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-		1,230,960,000	994,583,200	-	-	-		1,208,940,000	982,190,000	-	-	-	-	0,98	0,98	-		
	Pengadaan Mebel	-			51,899,400	127,662,000	-		-		51,480,000	125,700,000	-				0,98	0,98	-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	169.242.875	100,980,000	484,616,698	408,086,900	-	-	168.685.000	99,780,000	477,880,000	405,350,000	-	-	0.98	0.99	0,98	0,98	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	242.592.525	230,851,825	254,643,776	305,825,933	-	-	241.518.728	230,851,825	252,839,593	299,522,945	-	-	0.98	0.98	0,98	0,98	-		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12.480.700		-	-	-	-	12.480.700		-	-	-	-	1.00	-	-	-	-		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	77.062.000	77,062,000	124,589,376	132,752,000	-	-	76.034.953	75,962,000	123,086,393	127,587,262	-	-	0.98	0.99	0,98	0.97	-		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	19.800.000	21,820,000	-	141,653,933	-	-	19.786.250	21,320,000	-	140,515,683	-	-	0.98	0.99	-	0,99	-		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	133.249.825	131,969,825	130,054,400	31,420,000	-	-	133.216.825	130,769,825	129,753,200	31,420,000	-	-	0.99	0.99	0,99	0,99	-		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	486.370.092	447,825,000	659,305,386	926,080,000	-	-	467.265.431	445,925,000	657,045,724	924,222,327	-	-	0.97	0.99	0.99	0.99	-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	204.300.000	301,975,000	568,350,000	876,820,000	-	-	203.979.639	301,275,000	566,565,724	876,022,327	-	-	0.99	0.99	0,99	0,99	-		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	-	144.460.000		-	-	-	-	144.240.700	-	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Dinas Operasional atau Lapangan																				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	26.040.000	25,350,000	36,340,000	49,260,000.00	-	-	25.875.000	24,950,000	36,110,000	48,200,000	-	-	0,98	0,98	0,98	0,98	-		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	93.570.092	120,500,000	54,615,386	-	-	-	93.170.092	119,500,000	54,370,000	-	-	-	0,94	0,96	0,98	-	-		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN *	-	408.757.800	459,400,000	3,297,696,125	4,227,648,825	-	-	401.877.800	455,400,000	3,273,589,335	4,143,529,212	-	-	0,96	0,95	0,99	1,00	-		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	408.757.800	459,400,000	3,297,696,125	4,227,648,825	-	-	401.877.800	455,400,000	3,273,589,335	4,143,529,212	-	-	0,93	0,85	0,95	0,96	-		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	-	3,365,500	-	-	-	-	-	3,365,500	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	-	6,376,000	191,290,625	2,977,848,250.00	-	-	-	6,376,000	181,432,713	2,911,467,017	-	-	-	1,00	0,96	0,95	-		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	-	154.647.250	128,543,725	2,613,446,800	620,189,650.00	-	-	153.897.250	128,543,725	2,601,949,105	607,622,642	-	-	0,98	0,99	0,99	0,92	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				41,606,325	41,605,875.00	-				41,606,325	41,105,875					1.00	0,97	-		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	88.171.025	136,013,150	209,094,775	274,962,600.00	-	-	86.821.025	134,013,150	206,463,638	270,953,450	86,821	-	0,98	0,98	0,98	0,98	-		
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	161.401.525	185,101,625	242,257,600	313,042,450.00	-	-	156.621.525	184,701,625	242,137,554	312,380,228	156,622	-	0,97	0,99	1.00	0,99	-		
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK *	-	2,184,651,175	2,671,870,000	43,413,760,550	64,098,036,450	-	-	2,161,848,575	2,645,870,000	43,412,430,945	61,321,500,556	2,161,848.58	-	0,95	0,96	0,99	0,97	-		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	-	2,184,651,175	2,671,870,000	43,413,760,550	64,098,036,450	-	-	2,161,848,575	2,645,870,000	43,412,430,945	61,321,500,556	2,161,848.58	-	0,95	0,96	0,99	0,97	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																				
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	3,760,000	3,049,000	-	-	-	-	3,760,000	3,049,000	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-		
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	6,260,000	5,549,000	42,121,588,750	62,573,395,400	-	-	6,260,000	5,549,000	42,121,488,440	62,555,349,400	-	-	1.00	1.00	1.00	0,98	-		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	-	1,800,960,700	2,203,223,000	275,064,200	746,342,050,000	-	-	1,800,510,700	2,203,223,000	274,995,000	727,283,640	-	-	1.00	1.00	0,98	0,94	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																				
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	3,760,000	3,049,000	-	-	-	-	3,760,000	3,049,000	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-		
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	6,260,000	5,549,000	42,121,588,750	62,573,395,400	-	-	6,260,000	5,549,000	42,121,488,440	62,555,349,400	-	-	1.00	1.00	1.00	0,98	-		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	-	1,800,960,700	2,203,223,000	275,064,200	746,342,050,000	-	-	1,800,510,700	2,203,223,000	274,995,000	727,283,640	-	-	1.00	1.00	0,98	0,94	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	5,823,320,775	5,720,090,000	4,456,981,700	41,130,800,138	-	-	5,802,793,379	5,650,090,000	4,456,232,186	40,413,150,390	-	-	0,99	0,98	0,99	0,97	-		
	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	4,129,000	3,324,000	-	-	-	-	4,129,000	3,224,000	-	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-		
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	3,815,500	3,010,500	4,120,000,000	40,181,733,788	-	-	3,815,500	2,980,500	4,120,000,000	39,496,192,000	-	-	1.00	1.00	1.00	0.98	-		
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	5,456,242,350	5,436,709,900	97,898,450	607,100,350.00	-	-	5,455,642,350	5,423,709,900	97,346,035	595,144,639	-	-	0,99	0,98	0,95	0,89	-		
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,	-	-	142,195,975	63,579,600	79,300,950.00	-	-	-	141,995,975	63,568,030	75,386,189	-	-	-	0,98	0,98	0,97	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																				
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	359,133,925	142,195,975	175,503,650	262,665,050.00	-	-	339,206,529	142,195,975	175,318,121	246,427,562	-	-	0,98	1.00	0,97	0,95	-		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA *	-	208,630,850	338.010,000	364,643,625	603,709,475	-	-	205,903,947	324.010,000	363,756,895	576,673,708	-	-	0,97	0,94	0,98	0,87	-		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	208,630,850	338,010,000	364,643,625	603,709,475	-	-	205,903,947	324.010,000	363,756,895	576,673,708	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	3,843,000	2,892,800	-	-	-	-	3,843,000	2,845,800	-	-	-	-	1.00	0,98	-	-	-		
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	-	3,843,000	3,038,000	-	-	-	-	3,843,000	3,026,00075	-	-	-	-	1.00	0,98	-	-	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	56,435,100	72,583,950	153,366,875	115,960,200.00	-	-	55,985,100	72,583,950	153,106,058	108,642,700	-	-	0,98	1.00	0,98	0,96	-		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	66,324,900	63,571,900	66,912,775	132,957,300.00	-	-	65,524,900	63,481,900	66,853,828	131,743,900	-	-	0,98	0,99	0,99	0,98	-		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	78,184,850	195,923,350	144,363,975	354,791,975.00	-	-	76,707,947	195,723,350	143,797,009	336,287,108	-	-	0,97	1.00	0,98	0,88	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL *	-	649,913,750	532.000.000	1,327,059,350	1,912,296,250	-	-	617,810,450	528.000.000	1,317,772,278	1,907,661,139	-	-	0,95	0,99	0,99	0,99	-		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	649,913,750	532,000,000	1,327,059,350	1,912,296,250	-	-	617,810,450	528.000.000	1,317,772,278	1,907,661,139	-	-	0,95	0,99	0,99	0,99	-		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	2,894,000	4,536,525	-	-	-	-	2,894,000	4,526,525	-	-	-	-	1.00	0.99	-	-	-		
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	-	43,990,000	19,216,025	88,030,850	331,431,650.00	-	-	43,765,000	18,916,025	87,444,360	346,418,511	-	-	0,99	1.00	0,99	0,98	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Penanganan Konflik di Daerah																				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	40,400,000	86,773,850	87,672,500	133,038,750.00	-	-	40,400,000	86,773,850	84,081,946	125,400,841	-	-	1.00	1,00	0,99	0,98	-		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	260,515,900	144,859,975	423,025,100	290,868,650.00	-	-	252,810,400	144,859,975	420,590,104	286,564,454	-	-	0,98	1,00	0,98	0,98	-		
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	-	196,191,950	167,745,450	280,632,850	303,265,700.00	-	-	186,169,150	167,745,450	280,006,808	302,984,620	-	-	0,98	1,00	0,99	0,99	-		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																				
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	-	105,921,900	108,868,175	447,698,050	853,691,500.00	105,922	-	91,771,900	108,868,175	445,649,060	846,292,713	91,772	-	0,98	1,00	0,99	0,98	0,87		

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional maupun Daerah, serta mewujudkan ketentraman, Ketertiban Umum, Stabilitas Politik dan Kehidupan bermasyarakat yang harmonis, maka kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029 diarahkan kepada :

1. **Masyarakat Umum** Masyarakat yang membutuhkan informasi, pembinaan, dan fasilitasi di bidang politik, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, serta kerukunan hidup beragama.
2. **Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan LSM** Ormas yang membutuhkan pembinaan, fasilitasi pendaftaran, serta penguatan kapasitas agar berperan dalam menjaga stabilitas dan partisipasi pembangunan daerah.
3. **Partai Politik** Partai politik di daerah yang mendapatkan fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi, kaderisasi politik, dan akuntabilitas keuangan.
4. **Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tokoh Agama** Tokoh agama, pemuka masyarakat, serta forum kerukunan yang menjadi mitra strategis dalam membangun harmoni sosial dan pencegahan konflik keagamaan
5. **Pemilih Pemula, Generasi Muda, dan Mahasiswa** Kelompok pemuda yang perlu mendapatkan Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, serta penanaman Nilai-Nilai Pancasila untuk memperkuat karakter kebangsaan.
6. **Aparatur Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal** Perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, dan instansi terkait yang menjadi mitra kerja dalam sinkronisasi kebijakan Bidang Politik dan Kewaspadaan Nasional.
7. **Komunitas Adat dan Tokoh Masyarakat** Kelompok adat dan tokoh lokal yang berperan menjaga kearifan lokal, ketahanan sosial budaya, serta menjadi penghubung dalam resolusi konflik sosial.
8. **Kelompok Rentan dan strategis** Termasuk perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat yang rawan terpapar radikalisme, intoleransi, maupun ancaman terhadap keutuhan NKRI.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan permasalahan dan isu strategis pada urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik menjadi dasar dalam penjabaran visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kristalisasi dari permasalahan aktual yang bersumber dari analisis kondisi daerah serta telaah isu strategis global, nasional, dan regional. Analisis ini menjadi pijakan penting dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

1). Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

Dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan strategis yang menjadi tantangan serius dalam periode perencanaan tahun 2025–2029. Permasalahan tersebut meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dapat dirumuskan Permasalahan Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya implementasi Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) di lingkungan masyarakat
2. Kemajemukan sosial budaya dan kondisi geografis Sulawesi Tengah yang kompleks turut menghadirkan tantangan tersendiri
3. Kehidupan politik daerah yang belum sepenuhnya demokratis. Masih terdapat kecenderungan rekayasa politik oleh kelompok tertentu, lemahnya budaya politik yang sehat, serta rendahnya literasi politik masyarakat
4. Kebijakan pembangunan ekonomi yang belum menciptakan pemerataan

antar daerah

5. Lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan masyarakat
6. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, masih terdapat sejumlah permasalahan utama yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Tahun 2025–2029. Permasalahan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan faktor penghambat yang berimplikasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

- Permasalahan pertama adalah masih rendahnya implementasi Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) di lingkungan masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurang optimalnya program pembinaan ideologi yang berkelanjutan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai IPOLEKSOSBUD, serta keterbatasan sarana dan media sosialisasi ideologi.
- Permasalahan kedua berkaitan dengan kemajemukan sosial budaya dan kondisi geografis Sulawesi Tengah yang kompleks. Keberagaman etnis, agama, dan budaya, apabila tidak dikelola secara tepat, berpotensi memunculkan gesekan sosial. Sementara itu, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau menyebabkan kesenjangan pembangunan antarwilayah, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
- Permasalahan ketiga adalah kehidupan politik daerah yang belum sepenuhnya demokratis. Masih terdapat kecenderungan rekayasa politik oleh kelompok tertentu, lemahnya budaya politik yang sehat, serta rendahnya literasi politik masyarakat. Faktor penghambat utama pada aspek ini antara lain minimnya pendidikan politik yang inklusif, rendahnya partisipasi politik berbasis kesadaran, serta dominasi kepentingan kelompok tertentu dalam proses politik.
- Permasalahan keempat adalah kebijakan pembangunan ekonomi yang

belum menciptakan pemerataan antar daerah. Kondisi ini dipengaruhi oleh kesenjangan akses pembangunan, lemahnya koordinasi antar sektor, serta tingginya ketergantungan ekonomi pada daerah tertentu sebagai pusat pertumbuhan.

- Permasalahan kelima adalah lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan masyarakat, khususnya pada generasi muda. Faktor penghambat permasalahan ini adalah derasnya arus globalisasi dan pengaruh budaya luar, terbatasnya program penguatan wawasan kebangsaan, serta lemahnya peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan.
- Permasalahan keenam adalah menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya integrasi pendidikan kebangsaan di sekolah, terbatasnya kegiatan pembinaan ideologi secara intensif, serta belum optimalnya sinergi antar lembaga dalam memperkuat ketahanan nasional.

permasalahan utama beserta faktor penghambatnya tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada periode perencanaan Tahun 2025–2029. Penanganan yang tepat melalui strategi, kebijakan, dan program yang terarah sangat diperlukan untuk memperkuat ideologi, mengelola keberagaman, memperkuat demokrasi, mendorong pemerataan pembangunan, serta membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat Sulawesi Tengah. Dari permasalahan utama diatas dapat dijabarkan kedalam tabel beserta faktor penghambat masing-masing permasalahan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pemetaan Masalah Utama serta Faktor Penghambat Sasaran
Pembangunan Daerah pada Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Masalah Utama	Masalah	Faktor Penghambat
1.	Rendahnya implementasi Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya	Nilai IPOLEKSOSBUD belum dipahami dan diterapkan secara luas	- Kurangnya internalisasi ideologi bangsa - Lemahnya sosialisasi dan

	(IPOLEKSOSBUD)	oleh masyarakat	pembinaan kesadaran kebangsaan - Pengaruh globalisasi dan arus informasi
2.	Kemajemukan suku, etnis, agama, budaya, dan kondisi geografis wilayah	Rentan terjadi konflik horizontal berbasis identitas dan ketidakmerataan pembangunan	- Belum optimalnya forum komunikasi antar kelompok masyarakat - Kesenjangan pembangunan antarwilayah - Minimnya pemahaman toleransi
3.	Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis	Masih adanya rekayasa politik dan praktik politik yang tidak sehat	- Rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat - Lemahnya penegakan hukum dalam praktik politik - Dominasi kepentingan kelompok/elit politik
4.	Kebijakan pembangunan ekonomi yang belum merata	terjadi ketimpangan antar daerah dalam memperoleh akses dan manfaat pembangunan ekonomi	- Infrastruktur dan konektivitas antarwilayah belum memadai - Kebijakan pembangunan lebih terpusat di daerah tertentu - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
5.	Lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme	Rendahnya rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda	- Kurangnya kegiatan yang menumbuhkan rasa kebangsaan - Pengaruh budaya asing yang lebih dominan - Lemahnya keteladanan dari tokoh masyarakat dan elit bangsa
6.	Lunturnya pemahaman nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	Nilai kebangsaan tidak menjadi landasan perilaku sehari-hari	- Pendidikan wawasan kebangsaan tidak terintegrasi - Kurangnya sosialisasi dan pengamalan nilai - Minimnya media kreatif untuk generasi muda

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Penentuan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Identifikasi isu strategis ini menjadi penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program kerja untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

A. Isu Strategis Global

Dinamika Global ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, arus globalisasi, serta meningkatnya interaksi lintas negara. Hal ini membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi, pertukaran budaya, dan peluang kerjasama internasional. Namun demikian, di sisi lain, muncul tantangan berupa penetrasi budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai kebangsaan, potensi radikalisme transnasional, serta meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme dan kejahatan siber. Kondisi ini menuntut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat peran dalam Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Serta Literasi Politik Masyarakat, sehingga mampu menghadapi pengaruh global dengan tetap menjaga Persatuan dan Keutuhan Bangsa.

B. Isu Strategis Nasional

Pada tingkat Nasional, isu strategis yang mengemuka adalah penguatan demokrasi, penegakan hukum, stabilitas politik, serta upaya menjaga ketahanan ideologi Pancasila di tengah derasnya arus perubahan Sosial, Politik, dan Ekonomi. Selain itu, tantangan Nasional terkait dengan kesenjangan pembangunan antar wilayah, dinamika politik menjelang pemilu, serta ancaman intoleransi dan konflik horizontal juga menjadi perhatian. Bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, isu nasional ini berimplikasi pada perlunya peningkatan kapasitas lembaga dalam pengelolaan politik daerah yang sehat, memperkuat pendidikan politik masyarakat, serta membangun mekanisme deteksi dini dan pencegahan potensi konflik.

C. Isu Strategis Regional

Pada tataran regional, Sulawesi Tengah memiliki karakteristik yang khas, yaitu kondisi geografis yang luas dan kompleks serta keberagaman etnis, agama, dan budaya masyarakatnya. Keberagaman ini merupakan potensi yang dapat memperkuat harmoni sosial, namun sekaligus berisiko menimbulkan gesekan apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru di beberapa daerah berpotensi menimbulkan kesenjangan antarwilayah. Isu regional lainnya adalah potensi kerawanan sosial politik yang muncul akibat pemekaran wilayah, dinamika politik lokal, serta mobilitas penduduk dari luar daerah. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu mengoptimalkan peran fasilitasi dalam menjaga ketenteraman masyarakat, membina kerukunan, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan politik yang demokratis.

D. Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi sejumlah tantangan yang bersumber dari dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, serta kondisi geografis wilayah. Tantangan tersebut muncul sebagai permasalahan pembangunan yang perlu direspons secara tepat melalui perumusan isu-isu strategis yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada solusi. Secara umum, permasalahan yang mengemuka dalam urusan penyelenggaraan Kesatuan Bangsa Dan Politik meliputi rendahnya implementasi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya (IPOLEKSOSBUD) di masyarakat; kompleksitas kemajemukan suku, etnis, agama, dan budaya yang ditambah dengan kondisi geografis yang sulit; kehidupan politik daerah yang belum sepenuhnya demokratis; kebijakan pembangunan ekonomi yang belum menciptakan pemerataan; serta menurunnya semangat nasionalisme, patriotisme, dan implementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional. Keenam permasalahan utama tersebut menunjukkan bahwa Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai fasilitator, mediator dalam menjaga stabilitas Politik Dan Ketahanan Bangsa, tetapi juga sebagai penggerak dalam membangun Kesadaran Ideologi Dan Nasionalisme yang kuat di tengah masyarakat. Di samping itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting dalam memperkuat demokrasi lokal, mengelola keragaman sosial budaya, serta memastikan integrasi dan kohesi sosial sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan.

Oleh karena itu, identifikasi isu strategis menjadi langkah penting untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada periode Renstra 2025–2029. Isu-isu strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan faktual, dinamika lingkungan global, nasional, dan regional, serta potensi daerah yang dapat dioptimalkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah yang berkeadilan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

1. Penguatan Implementasi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IPOLEKSOSBUD)

Rendahnya implementasi Ideologi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya (IPOLEKSOSBUD) di masyarakat menjadi salah satu isu strategis utama yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi ini terlihat dari masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, lemahnya kesadaran politik yang sehat, serta kurang optimalnya internalisasi nilai-nilai budaya lokal yang selaras dengan semangat nasionalisme. Fenomena ini dipengaruhi oleh derasnya arus globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi, serta semakin terbukanya akses masyarakat terhadap budaya dan ideologi asing yang seringkali tidak sejalan dengan jati diri bangsa. Situasi tersebut, apabila tidak diantisipasi,

dapat menggerus semangat kebangsaan, melemahkan ketahanan ideologi, serta menurunkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Dalam konteks daerah, penguatan implementasi IPOLEKSOSBUD menjadi penting karena Sulawesi Tengah memiliki kemajemukan etnis, budaya, agama, serta kondisi geografis yang beragam. Keragaman ini merupakan potensi besar untuk memperkaya identitas bangsa, namun sekaligus berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan jika tidak dikelola dengan baik melalui penanaman ideologi dan wawasan kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk merumuskan strategi yang mampu memperkuat pemahaman dan implementasi IPOLEKSOSBUD secara komprehensif, terukur, dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi pembinaan ideologi, peningkatan literasi politik masyarakat, revitalisasi pendidikan kebangsaan, serta pengembangan ruang-ruang dialog sosial budaya yang inklusif. Dengan demikian, penguatan implementasi IPOLEKSOSBUD diharapkan mampu memperkokoh ketahanan ideologi dan menjaga persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Pengelolaan Kemajemukan Sosial Budaya dan Kondisi yang Kompleks

Provinsi Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemajemukan yang tinggi, baik dari aspek etnis, agama, budaya, maupun bahasa daerah. Keragaman ini merupakan kekayaan sekaligus potensi besar dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat identitas bangsa. Namun di sisi lain jika tidak dikelola dengan baik, kemajemukan tersebut berpotensi menimbulkan gesekan sosial, konflik horizontal, dan perpecahan yang dapat mengganggu stabilitas politik serta ketahanan daerah.

Selain keragaman sosial budaya, Sulawesi Tengah juga

memiliki kondisi geografis yang cukup kompleks, ditandai dengan wilayah yang luas, kondisi topografi yang beragam, serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Keterbatasan akses infrastruktur dan distribusi pembangunan yang belum seimbang menimbulkan kesenjangan antarwilayah, yang dapat memperkuat potensi konflik dan menurunkan rasa keadilan sosial di masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengelolaan kemajemukan sosial budaya dan kondisi geografis yang kompleks menjadi isu strategis penting bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan forum komunikasi lintas agama, etnis, dan budaya; pengembangan model pembinaan masyarakat berbasis kearifan lokal; serta penguatan sistem deteksi dini dan pencegahan konflik sosial di wilayah-wilayah rawan. Dengan strategi pengelolaan yang tepat, kemajemukan dan kondisi geografis yang menantang dapat diubah menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu menjadi fasilitator dan mediator yang efektif dalam menjaga kerukunan, membangun kohesi sosial, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di Sulawesi Tengah.

3. Penguatan Demokrasi Lokal dan Budaya Politik yang Sehat

Kehidupan politik di Provinsi Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup tinggi, namun belum sepenuhnya mencerminkan praktik demokrasi yang matang dan sehat. Masih terdapat kecenderungan rekayasa politik oleh kelompok tertentu, dominasi kepentingan elit, serta lemahnya kesadaran kritis masyarakat dalam berpartisipasi politik. Kondisi ini menyebabkan kualitas demokrasi lokal berjalan tidak optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses politik dan pemerintahan.

Selain itu, budaya politik masyarakat masih didominasi oleh

pola pikir pragmatis, rendahnya literasi politik, serta minimnya ruang partisipasi politik yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat. Hal ini berdampak pada lemahnya kontrol sosial terhadap kebijakan publik serta menurunnya kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks ini, penguatan demokrasi lokal dan budaya politik yang sehat menjadi isu strategis yang penting untuk dijawab. Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah perlu mendorong peningkatan literasi politik masyarakat, memperluas pendidikan politik yang berorientasi pada kesadaran dan tanggung jawab, serta menciptakan ruang partisipasi yang adil, inklusif, dan transparan.

Penguatan demokrasi lokal tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki proses politik elektoral, tetapi juga untuk membangun budaya politik yang sehat di tingkat masyarakat. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta kehidupan politik daerah yang lebih demokratis, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, sehingga dapat memperkuat stabilitas politik dan mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkeadilan.

4. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antarwilayah

Pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah selama ini belum sepenuhnya menciptakan pemerataan antarwilayah. Masih terdapat kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kawasan pesisir dan pegunungan, serta daerah dengan akses infrastruktur yang baik dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, memperlebar jurang kesejahteraan, serta melemahkan kohesi sosial di tengah masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang lebih terfokus pada wilayah tertentu juga berdampak pada munculnya persepsi ketidaksetaraan dan rasa kurang diperhatikan di daerah-daerah yang tertinggal. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memunculkan potensi konflik sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta melemahkan semangat persatuan dan kesatuan.

Dalam konteks ini, Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan aspek pemerataan dan keadilan sosial. Melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, dan komunikasi politik, Bakesbangpol dapat berkontribusi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah, mendorong penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif, serta mengawal agar setiap program pembangunan memberikan manfaat yang merata.

Dengan adanya pemerataan pembangunan, stabilitas politik dan sosial di daerah akan semakin kuat, karena masyarakat merasakan keadilan dalam distribusi hasil pembangunan. Pada akhirnya, pemerataan pembangunan antarwilayah akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Revitalisasi Nasionalisme dan Patriotisme di Kalangan Masyarakat

Semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya di kalangan generasi muda, mengalami penurunan seiring dengan derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi informasi, serta pengaruh budaya luar yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh

melemahnya peran keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial dalam menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, semangat kebersamaan, serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jika kondisi ini tidak segera direspons, maka dikhawatirkan akan melemahkan ikatan sosial, menurunkan partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan, serta mengikis kesadaran kolektif untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tentu berpotensi menimbulkan kerawanan ideologi dan menurunkan daya tahan bangsa terhadap ancaman disintegrasi.

Revitalisasi nasionalisme dan patriotisme menjadi isu strategis yang penting untuk dijawab melalui berbagai pendekatan yang inovatif, adaptif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah perlu memperkuat program pembinaan wawasan kebangsaan, mengembangkan metode pendidikan kebangsaan yang relevan dengan perkembangan zaman, serta membangun ruang-ruang ekspresi kebangsaan bagi generasi muda melalui kegiatan kreatif, seni budaya, maupun media digital.

Dengan langkah tersebut, diharapkan semangat nasionalisme dan patriotisme dapat tumbuh kembali secara kuat di tengah masyarakat. Revitalisasi nilai kebangsaan ini tidak hanya memperkokoh identitas bangsa, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, menjaga keutuhan NKRI, serta menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

6. Penguatan Pemahaman dan Implementasi Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional

Menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, serta ketahanan nasional di masyarakat menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan kehidupan

berbangsa dan bernegara. Kondisi ini terlihat dari semakin berkurangnya internalisasi nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, melemahnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga persatuan, serta berkurangnya daya tahan masyarakat terhadap pengaruh ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila.

Fenomena tersebut dipicu oleh minimnya integrasi pendidikan kebangsaan dalam kurikulum, terbatasnya kegiatan pembinaan ideologi yang berkelanjutan, serta belum optimalnya sinergi antar lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat menurunkan semangat persatuan, meningkatkan kerentanan terhadap konflik sosial, dan melemahkan ketahanan nasional.

Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan implementasi nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional menjadi isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah perlu mendorong gerakan kolektif melalui pendidikan kebangsaan yang sistematis, program pembinaan ideologi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa untuk memperkuat kesadaran kebangsaan.

Melalui upaya ini, nilai-nilai Pancasila dapat kembali dihayati dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat, wawasan kebangsaan semakin tertanam kuat, dan ketahanan nasional dapat terjaga secara kokoh. Dengan demikian, masyarakat Sulawesi Tengah akan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan global maupun dinamika internal, sekaligus memperkuat keutuhan NKRI dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

E. Rumusan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan melalui perumusan isu-isu strategis berdasarkan kontekstual (lingkungan dinamis yang meliputi Global, Nasional dan Regional), isu KLHS, serta pertimbangan potensi dan permasalahan yang ada yang dilakukan antara lain melalui penjangkaran aspirasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut Adalah sintesa hasil perumusan permasalahan serta rumusan isu sesuai konteks pembangunan daerah di Sulawesi Tengah.

Tabel 2.2

Kesimpulan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Te

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Keragaman sosial budaya, agama, suku, etnis, serta potensi sumber daya alam.	Masih rendahnya implementasi IPOLEKSOSBUD di masyarakat.	Rendahnya kualitas lingkungan sosial dan budaya akibat lemahnya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan.	Arus globalisasi dan ideologi transnasional.	Dinamika politik dan rendahnya literasi kebangsaan.	Kompleksitas kemajemukan sosial budaya di Sulteng.	Penguatan Implementasi IPOLEKSOSBUD.
Posisi strategis Sulteng dengan keragaman budaya dan geografis.	Kemajemukan sosial budaya dan kondisi geografis yang kompleks.	Potensi konflik sosial akibat kesenjangan pembangunan antarwilayah.	Isu migrasi dan perubahan iklim.	Kesenjangan pembangunan dan intoleransi.	Konflik sosial berbasis etnis/agama.	Pengelolaan Kemajemukan Sosial Budaya dan Kondisi Geografis yang Kompleks.
Potensi partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal.	Kehidupan politik yang belum sepenuhnya demokratis.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.	Tuntutan demokrasi global.	Politisasi birokrasi, lemahnya literasi politik.	Konflik kepentingan elit lokal.	Penguatan Demokrasi Lokal dan Budaya Politik yang Sehat.
Potensi ekonomi daerah berbasis sumber daya alam.	Kebijakan pembangunan ekonomi belum mampu menciptakan pemerataan.	Kesenjangan sosial-ekonomi yang berpotensi menimbulkan kerawanan politik.	Ketidakpastian ekonomi global.	Kesenjangan pembangunan antarwilayah.	Ketimpangan pembangunan di kabupaten/kota.	Mendorong Pemerataan Pembangunan Antarwilayah.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme masyarakat.	Lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme.	Menurunnya integrasi sosial dan identitas nasional.	Pengaruh budaya asing.	Menguatnya politik identitas	Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebangsaan.	Revitalisasi Nasionalisme dan Patriotisme di Kalangan Masyarakat.
Ideologi Pancasila sebagai dasar negara.	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional.	Menurunnya daya tahan masyarakat terhadap ideologi transnasional.	Radikalisme dan ideologi transnasional.	Lemahnya pendidikan Pancasila.	Kurangnya pembinaan wawasan kebangsaan.	Penguatan Pemahaman dan Implementasi Nilai Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

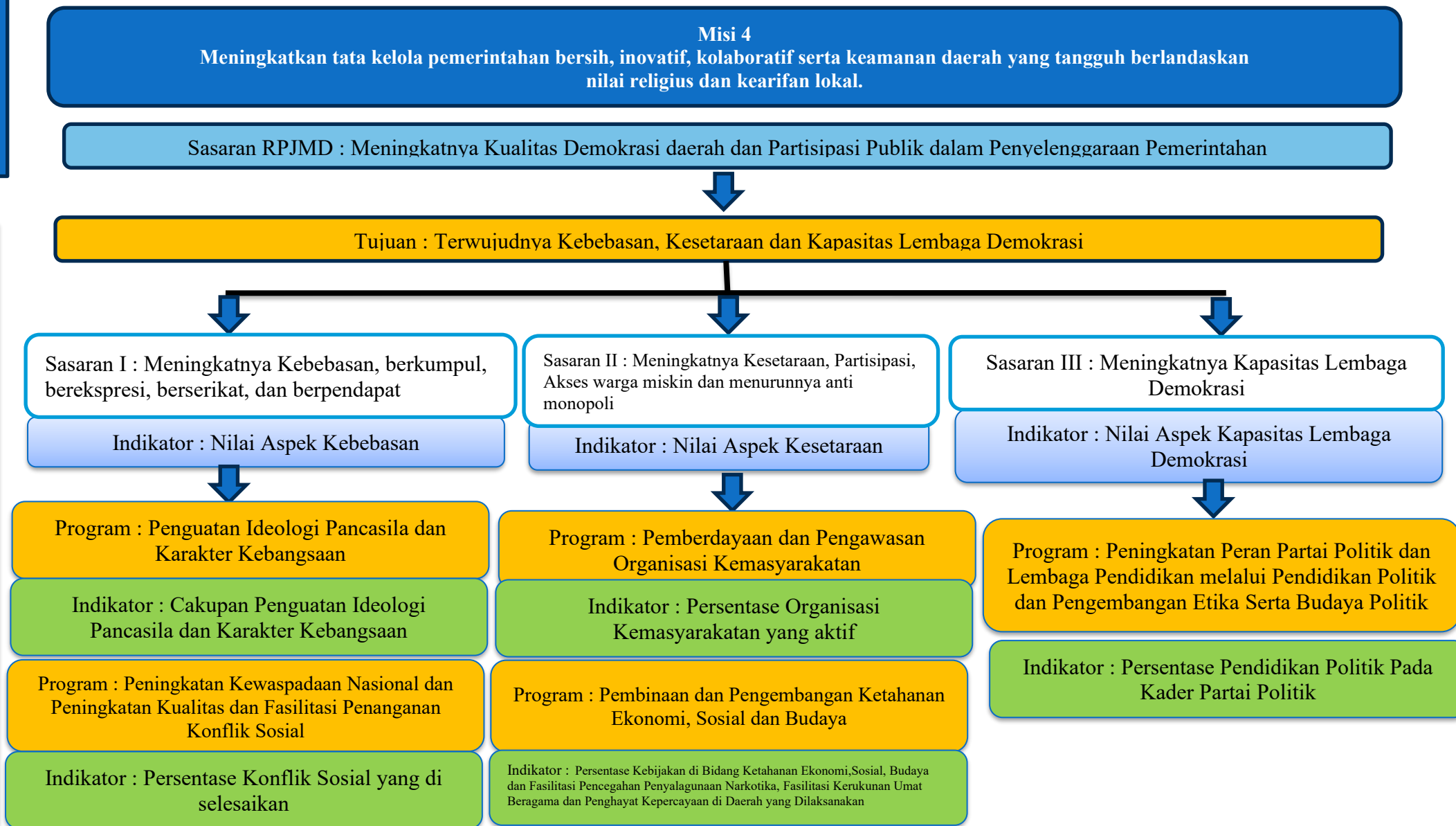
Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Dengan berlandaskan Misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan : ***“Terwujudkan Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi”***).

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan Program dan Kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan tingkat capaiannya (target yang

direncanakan). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/Tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Dalam penentuan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, disusun Cascading (pohon kinerja) yang merupakan sebuah proses penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, serta tujuan dan sasaran pembangunan kedalam Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah dengan menggunakan kerangka logis sehingga menjadi lebih rinci dan terbagi habis. Dengan kata lain adanya Cascading tersebut, tumpang tindih tugas dan kewenangan pada setiap jenjang jabatan dapat dihindari. Adapun Cascading Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.1 Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah											
	Terwujudnya kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi		Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)	79,13	80,5	81,75	83	84,5	86	87,5	
		Meningkatnya kebebasan, berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	Nilai Aspek Kebebasan (Nilai)	87,11	88	88,75	89,5	90,25	91	91,1	
		Meningkatnya Kesenjangan, Partisipasi, akses warga miskin dan menurunnya anti monopoli	Nilai Aspek Kesenjangan (Nilai)	74,78	76,5	78	80	82	84	84,2	
		Meningkatnya kapasitas lembaga demokrasi	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Nilai)	76,48	77,5	78,5	79,5	81	83	83,3	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Strategi pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik disusun dengan menyelaraskan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029 serta strategi pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029. Penyelarasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berjalan secara parsial, tetapi menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif, serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk memperkuat ideologi Pancasila, meningkatkan ketahanan sosial-politik, serta memperkuat kohesi sosial masyarakat di tengah dinamika perubahan sosial dan politik yang berkembang. Dalam pelaksanaannya, strategi ini diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi, pengembangan pendidikan politik yang beretika, peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik sosial, serta pemberdayaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah.

Lebih lanjut, strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diterjemahkan ke dalam penahapan pelaksanaan Renstra yang selaras dengan tahapan pembangunan daerah.

Penahapan tersebut mempertimbangkan potensi wilayah, permasalahan mendasar, serta kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional. Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025-2029

STRATEGI				
TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Tujuan: Terwujudnya Kebebasan, Kesenjangan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi				
Sasaran: Meningkatnya Kebebasan, berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat				
Penyusunan pedoman internalisasi nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan demokrasi lokal pada masyarakat	Sosialisasi dan pendidikan kebangsaan di tingkat sekolah, kampus, dan komunitas strategis.	Fasilitasi forum dialog kebangsaan lintas etnis, agama, dan organisasi untuk memperkuat toleransi dan demokrasi.	Implementasi gerakan bersama masyarakat sipil dalam menjaga kebebasan berpendapat dan berkumpul	Konsolidasi, evaluasi, dan pelebagaan nilai Pancasila serta budaya demokrasi melalui regulasi dan kelembagaan daerah.
Pemetaan potensi kerawanan konflik sosial di tingkat kabupaten/kota	Peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat dalam deteksi dini dan pencegahan konflik.	Fasilitasi penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.	Penguatan jejaring kewaspadaan nasional berbasis komunitas.	Evaluasi dan pelebagaan model penanganan konflik sosial berkelanjutan.
Sasaran: Meningkatnya Kesenjangan, Partisipasi, akses warga miskin dan menurunnya antimonopoli				
Inventarisasi dan verifikasi Ormas di tingkat provinsi	Penguatan kapasitas kelembagaan Ormas melalui pelatihan manajemen organisasi.	Fasilitasi peran aktif Ormas dalam pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebijakan publik.	Monitoring dan evaluasi kinerja Ormas secara partisipatif.	Pelebagaan pola kemitraan Ormas dengan pemerintah daerah untuk pembangunan inklusif
Pemetaan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.	Penguatan kapasitas kelompok masyarakat rentan dalam mengakses peluang ekonomi.	Fasilitasi pengembangan usaha mikro berbasis kearifan lokal.	Integrasi program ketahanan sosial budaya dengan pembangunan daerah.	Evaluasi dan penguatan kelembagaan sosial budaya masyarakat.
Sasaran: Meningkatnya kapasitas lembaga demokrasi				

Penyusunan kurikulum pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat.	Pelaksanaan pendidikan politik terpadu melalui sekolah politik dan forum masyarakat.	Penguatan etika dan budaya politik melalui dialog kebangsaan.	Peningkatan partisipasi politik kelompok rentan (perempuan, pemuda, difabel).	Evaluasi dan pelebagaan peran partai politik serta lembaga pendidikan dalam pendidikan politik berkelanjutan.
---	--	---	---	---

Strategi pada masing-masing pentahapan pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya dituangkan ke dalam arah kebijakan, yang merupakan rangkaian langkah operasional dan kebijakan kerja sebagai penjabaran misi pemerintah daerah di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Arah kebijakan ini disusun secara selaras dengan strategi pembangunan daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, khususnya misi keempat yaitu ***“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang tangguh berlandaskan nilai religius dan kearifan lokal.”***

Penyusunan arah kebijakan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga memperhatikan isu-isu strategis nasional dan daerah sebagaimana termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029 khususnya terkait dengan penguatan ideologi Pancasila, ketahanan sosial politik, peningkatan kualitas demokrasi, serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga politik dalam mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan demokratis, serta memperkuat kohesi sosial berbasis nilai-nilai kebangsaan, religius dan kearifan lokal. Arah kebijakan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik ini dirumuskan sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, meliputi antara lain: penguatan wawasan kebangsaan dan karakter ideologis Pancasila; peningkatan kewaspadaan dini dan deteksi terhadap potensi konflik sosial; pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; pembinaan ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; serta pengembangan pendidikan politik dan etika demokrasi bagi partai politik, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 di sajikan pada tabel berikut ini.

TABEL 3.3

**ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
		Penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi lokal, termasuk peran DPRD, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil	- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat
			- Mengembangkan program internalisasi nilai ideologi negara dalam lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan komunitas sosial
			- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
		Penguatan sistem deteksi dini, pencegahan konflik, dan penanganan gangguan ketertiban masyarakat	- Memperkuat sistem informasi dan koordinasi kewaspadaan dini di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
			- Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sosial secara cepat, tepat, dan kolaboratif
			- Mengoptimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam menjaga stabilitas daerah.
		Peningkatan kolaborasi aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan pencegahan konflik sosial.	- Meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat melalui pembinaan dan fasilitasi kegiatan yang produktif dan berdaya guna
			- Mendorong terciptanya ormas yang tertib administrasi, taat hukum, dan berkontribusi pada pembangunan daerah

			- Mengembangkan pola kemitraan pemerintah dan ormas dalam menjaga ketahanan sosial.
		Meningkatkan stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat berbasis nilai-nilai lokal dan gotong royong	- Melaksanakan pembinaan ketahanan sosial budaya masyarakat berbasis nilai kearifan lokal dan semangat kebangsaan
			- Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah radikalisme
			- Mendorong pelibatan generasi muda dan komunitas budaya dalam pembangunan karakter bangsa
		Penguatan kapasitas kelembagaan demokrasi lokal, termasuk partai politik dan lembaga pendidikan politik	- Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan organisasi sosial politik
			- Memperkuat peran partai politik dalam membangun etika dan budaya politik yang sehat
			- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik secara cerdas, etis, dan berintegritas

Arah kebijakan sebagaimana tersaji pada tabel di atas merupakan penjabaran strategis dari tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029. Setiap arah kebijakan dirancang agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketahanan sosial politik, serta pembinaan kehidupan demokrasi yang sehat.

Melalui arah kebijakan ini, Badan kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat kapasitas lembaga demokrasi, serta memastikan terpeliharanya stabilitas daerah yang kondusif, aman, dan harmonis.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB.KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rumusan Program, Kegiatan, Sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulteng

Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai upaya operasionalisasi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik secara efektif, efisien, dan terukur. Rumusan ini juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

TABEL 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah							
	Terwujudnya kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi				Indeks Demokrasi Provinsi (Indeks)		
		Meningkatnya kebebasan, berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat			Nilai Aspek Kebebasan (Nilai)		
			Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
					Nilai Aspek Kebebasan (Nilai)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
				Jumlah dokumen kegiatan penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Paskibraka (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	8.01.02.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	8.01.02.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	8.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	8.01.02.1.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	8.01.02.1.01.0007 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
					Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	
					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	8.01.02.1.01.0009 - Pelaksanaan tugas Paskibraka	
					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	8.01.02.1.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.06.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	8.01.06.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kesetaraan, Partisipasi, akses warga miskin dan menurunnya anti monopoli	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Nilai Aspek Kesetaraan (Nilai)		
					Nilai Aspek Kesetaraan (Nilai)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
					Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
					Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.04.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	8.01.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	8.01.04.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Nilai Aspek Kesetaraan (Nilai)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

					Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
--	--	--	--	--	---	--	--

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	8.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya kapasitas lembaga demokrasi			Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Nilai)		
			Meningkatnya Etika dan Budaya Politik		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
					Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Nilai)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	

					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

					Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	8.01.03.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	8.01.03.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	8.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
--	--	--	--	--	--	---	--

4.2 Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulteng

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menetapkan program strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode perencanaan lima tahun ke depan. Program-program tersebut disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, isu strategis, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kewaspadaan nasional, penanganan konflik sosial, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta penguatan kapasitas lembaga demokrasi.

TABEL 4.2
PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
RPJMD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.793.008.034,28		17.836.902.056,88		19.141.993.206,97		20.602.367.163,53		22.240.711.398,78	
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					16.493.008.034		17.926.559.863		19.182.695.166		20.584.482.864		22.152.863.573	
SELISIH					300.000.000,28		89.657.806,12		40.701.959,03		17.884.299,53		87.847.825,78	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					9.942.763.032		10.852.295.261		10.852.295.261		11.611.955.930		12.424.792.845	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	50	55	60	9.942.763.032	65	10.852.295.261	70	10.852.295.261	75	11.611.955.930	75	12.424.792.845	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.534.769.313		1.657.550.858		2.913.686.161		3.117.644.192		3.335.879.286	
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	60	60	65	1.534.769.313	73,75	1.657.550.858	82,5	2.913.686.161	91,25	3.117.644.192	100	3.335.879.286	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai Aspek Kebebasan (Nilai)	87,11	88	88,75		89,5		90,25		91		91,1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.012.987.063		2.174.026.028		2.174.026.028		2.326.207.850		2.489.042.400	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	60	60	65	2.012.987.063	73,75	2.174.026.028	82,5	2.174.026.028	91,25	2.326.207.850	100	2.489.042.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Nilai)	76,48	77,5	78,5		79,5		81		83		83,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					1.803.919.313		1.948.232.858		1.948.232.858		2.084.609.158		2.230.531.799	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Nilai Aspek Kesetaraan (Nilai)	74,78	76,5	78	1.803.919.313	80	1.948.232.858	82	1.948.232.858	84	2.084.609.158	84,2	2.230.531.799	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	60	60	65		73,75		82,5		91,25		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					339.240.000		366.379.200		366.379.200		451.024.780		610.063.422	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Nilai Aspek Kesetaraan (Nilai)	74,78	76,5	78	339.240.000	80	366.379.200	82	366.379.200	84	451.024.780	84,2	610.063.422	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	60	60	65		73,75		82,5		91,25		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					859.329.313		928.075.658		928.075.658		993.040.954		1.062.553.821	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Nilai Aspek Kebebasan (Nilai)	87,11	88	88,75	859.329.313	89,5	928.075.658	90,25	928.075.658	91	993.040.954	91,1	1.062.553.821	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	60	60	65		73,75		82,5		91,25		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					16493008034.00		17926559863.00		19182695166.00		20584482864.00		22152863573.00	

4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Setiap program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang mencerminkan upaya konkret Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, rukun, dan demokratis, serta memperkuat ketahanan nasional dan persatuan bangsa. Adapun rencana program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN KESBANGPOL PROV. SULTENG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				16.793.008.034,28		17.836.902.056,88		19.141.993.206,97		20.602.367.163,53		22.240.711.398,78		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10.242.763.032,28		10.762.637.454,88		10.811.593.301,97		11.629.840.229,53		12.512.640.670,78		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	50	60	10.242.763.032,28	65	10.762.637.454,88	70	10.811.593.301,97	75	11.629.840.229,53	75	12.512.640.670,78	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
8.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				284.156.575,28		465.090.116		470.090.116		473.023.996		473.023.996		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	284.156.575,28	1	465.090.116	1	470.090.116	1	473.023.996	1	473.023.996		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			

8.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.879.825		27.721.700		27.721.700		30.493.870		30.493.870		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	5	3.879.825	5	27.721.700	5	27.721.700	5	30.493.870	5	30.493.870		
8.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				2.000.000		3.613.253		4.613.253		4.074.579		4.074.579		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	3.613.253	1	4.613.253	1	4.074.579	1	4.074.579		
8.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.000.000		3.613.253		4.613.253		4.613.253		4.613.253		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	3.613.253	1	4.613.253	1	4.613.253	1	4.613.253		
8.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.000.000		1.880.753		2.880.753		2.880.753		2.880.753		

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000	1	1.880.753	1	2.880.753	1	2.880.753	1	2.880.753		
8.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.000.000		2.613.253		3.613.253		4.074.578		4.074.578		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000	1	2.613.253	1	3.613.253	1	4.074.578	1	4.074.578		
8.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16.000.000		57.534.900		57.534.900		57.534.900		57.534.900		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	16.000.000	3	57.534.900	3	57.534.900	3	57.534.900	3	57.534.900		
8.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				258.276.750,28		366.722.417		366.722.417		366.722.417		366.722.417		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	258.276.750,28	1	366.722.417	1	366.722.417	1	366.722.417	1	366.722.417		

8.01.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0		500.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0	1	500.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
8.01.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0		890.587		1.390.587		1.629.646		1.629.646		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0	1	890.587	1	1.390.587	1	1.629.646	1	1.629.646		

8.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.253.008.034		8.612.658.433		8.515.658.433		9.267.135.225		10.078.972.140		
Persentase Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	8.253.008.034	1	8.612.658.433	1	8.515.658.433	1	9.267.135.225	1	10.078.972.140		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	45	45		45		45		45		45			

8.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.193.008.034		7.552.658.433		7.552.658.433		8.303.135.225		9.115.972.140		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	45	45	7.193.008.034	45	7.552.658.433	45	7.552.658.433	45	8.303.135.225	45	9.115.972.140		
8.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				900.000.000		900.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	900.000.000	12	900.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000	12	800.000.000		
8.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
8.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
8.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				132.000.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000		132.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	132.000.000	1	132.000.000	1	132.000.000	1	132.000.000	1	132.000.000		
8.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

8.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				177.000.000		192.000.000		206.000.000		205.000.000		205.000.000		
Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	177.000.000	1	192.000.000	1	206.000.000	1	205.000.000	1	205.000.000		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5.000.000		10.000.000		11.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	11.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

8.01.01.1.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				69.000.000		79.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	69.000.000	1	79.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
8.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				93.000.000		93.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	93.000.000	1	93.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
8.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
8.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				262.000.000		239.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000		
Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan-Undangan (Orang)	1	1	262.000.000	2	239.000.000	1	215.000.000	1	215.000.000	1	215.000.000		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

8.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				169.000.000		169.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	169.000.000	1	169.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
8.01.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
8.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				78.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1	78.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
8.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000		15.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	1	10.000.000	2	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
8.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				443.400.000		453.400.000		470.400.000		580.000.000		585.000.000		
Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	443.400.000	1	453.400.000	1	470.400.000	1	580.000.000	1	585.000.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
8.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		50.000.000		60.000.000		60.000.000		65.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000		
8.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				70.000.000		75.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
8.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				45.400.000		45.400.000		45.400.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	45.400.000	1	45.400.000	1	45.400.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

8.01.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				59.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000		59.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	59.000.000	1	59.000.000	1	59.000.000	1	59.000.000	1	59.000.000		
8.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000		200.000.000		200.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
8.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4.000.000		4.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000		
8.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				537.198.423		504.488.905,88		577.944.752,97		533.181.008,53		599.144.534,78		
Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	537.198.423	0	504.488.905,88	1	577.944.752,97	1	533.181.008,53	1	599.144.534,78		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		0		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		4		5		6			
8.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
8.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		75.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	0	100.000.000	1	100.000.000		
8.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		

ya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
8.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		5.000.000		10.000.000		27.884.299,53		97.847.825,78		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	10.000.000	2	5.000.000	4	10.000.000	5	27.884.299,53	6	97.847.825,78		
8.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				317.198.423		339.488.905,88		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	317.198.423	1	339.488.905,88	0	0	0	0	0	0		
8.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		377.944.752,97		315.296.709		311.296.709		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	377.944.752,97	1	315.296.709	1	311.296.709		

8.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.000.000		92.000.000		112.500.000		112.500.000		112.500.000		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	2.000.000 ⁹	1	92.000.000	1	112.500.000	1	112.500.000	1	112.500.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000		
8.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				70.000.000		70.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1	1	70.000.000	1	70.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000		

	Listrik yang Disediakan (Laporan)													
8.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
8.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

8.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				194.000.000		204.000.000		244.000.000		244.000.000		244.000.000		
Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	194.000.000	1	204.000.000	1	244.000.000	1	244.000.000	1	244.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	33		33		33		33		33			
8.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				80.000.000		80.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33	33	80.000.000	33	80.000.000	33	100.000.000	33	100.000.000	33	100.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
sananya Pemeliharaan Peralatan esin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000		
8.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		30.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
8.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		4.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
8.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		

8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.534.769.313		1.657.550.858		2.913.686.161		3.117.644.192		3.335.879.286		
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Nilai Aspek Kebebasan (Nilai)	87,11	88,75	1.534.769.313	89,5	1.657.550.	90,25	2.913.686.	91	3.117.644.19	91,1	3.335.879.286	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	60	65		73,75		82,5		91,25		100			

8.01.02.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.534.769.313		1.657.550.858		2.913.686.161		3.117.644.192		3.335.879.286		
Jumlah dokumen kegiatan penguatan Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	0	1	1.534.769.313	1	1.657.550.858	2	2.913.686.161	2	3.117.644.192	2	3.335.879.286		
	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	0	50		75		100		125		150			
	Jumlah Paskibraka (Orang)	56	71		71		71		71		71			

.01.02.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4.769.313		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (01)	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	0	1	4.769.313	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.02.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100.000.000		115.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	60	100	100.000.000	125	115.000.000	150	150.000.000	175	175.000.000	200	200.000.000		

8.01.02.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				80.000.000		90.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	120	100	80.000.000	110	90.000.000	125	100.000.000	150	125.000.000	200	150.000.000		
8.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				90.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	4	4	90.000.000	4	100.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000		
8.01.02.1.01.0006 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				65.000.000		70.000.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)	1	1	65.000.000	1	70.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000		
8.01.02.1.01.0007 - Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila				35.000.000		35.000.000		75.000.000		100.000.000		125.000.000		
Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)	0	50	35.000.000	75	35.000.000	100	75.000.000	125	100.000.000	150	125.000.000		
8.01.02.1.01.0008 - Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka				35.000.000		35.000.000		50.000.000		60.000.000		75.000.000		
Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)	0	1	35.000.000	1	35.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	75.000.000		
8.01.02.1.01.0009 - Pelaksanaan tugas Paskibraka				50.000.000		50.000.000		75.000.000		80.000.000		100.000.000		
Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	2	100.000.000		
8.01.02.1.01.0010 - Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				35.000.000		35.000.000		50.000.000		60.000.000		75.000.000		
Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000		
8.01.02.1.01.0011 - Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				35.000.000		35.000.000		50.000.000		60.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000		
8.01.02.1.01.0012 - Pembentukan Paskibraka				1.000.000.000		1.082.550.858		2.128.686.161		2.172.644.192		2.200.879.286		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	56	71	1.000.000.000	71	1.082.550.858	71	2.128.686.161	71	2.172.644.192	71	2.200.879.286		

8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				2.012.987.063		2.174.026.028		2.174.026.028		2.326.207.850		2.489.042.400		
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Nilai)	76,48	78,5	2.012.987.063	79,5	2.174.026.028	81	2.174.026.028	83	2.326.207.850	83,3	2.489.042.400	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	60	65		73,75		82,5		91,25		100			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				2.012.987.063		2.174.026.028		2.174.026.028		2.326.207.850		2.489.042.400		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	250	200	2.012.987.063	225	2.174.026.028	250	2.174.026.028	275	2.326.207.850	300	2.489.042.400		

	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	545	200		225		250		275		300			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
8.01.03.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.517.850.000		1.600.000.000		1.600.000.000		1.650.000.000		1.700.000.000		

Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	1.517.850.000	1	1.600.000.000	1	1.600.000.000	1	1.650.000.000	1	1.700.000.000		
8.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				195.000.000		245.000.000		245.000.000		295.000.000		345.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	545	200	195.000.000	225	245.000.000	250	245.000.000	275	295.000.000	300	345.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150.000.000		175.000.000		175.000.000		200.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	250	200	150.000.000	225	175.000.000	250	175.000.000	275	200.000.000	300	250.000.000		
8.01.03.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				135.137.063		139.026.028		139.026.028		166.207.850		179.042.400		

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2	3	135.137.063	3	139.026.028	3	139.026.028	3	166.207.850	3	179.042.400		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				1.803.919.313		1.948.232.858		1.948.232.858		2.084.609.158		2.230.531.799		
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	60	65	1.803.919.313	73,75	1.948.232.858	82,5	1.948.232.858	91,25	2.084.609.158	100	2.230.531.799	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
	Nilai Aspek Kesetaraan (Nilai)	74,78	78		80		82		84		84,2			
8.01.04.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				1.803.919.313		1.948.232.858		1.948.232.858		2.084.609.158		2.230.531.799		
Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	120	1.803.919.313	140	1.948.232.858	140	1.948.232.858	180	2.084.609.158	190	2.230.531.799		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	320	100		200		200		240		280			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	200	100		120		120		140		160			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

8.01.04.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		
8.01.04.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10.000.000		15.000.000		15.000.000		22.000.000		24.000.000		
Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	120	10.000.000	140	15.000.000	140	15.000.000	180	22.000.000	190	24.000.000		
8.01.04.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				110.000.000		185.000.000		185.000.000		258.000.000		316.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	320	100	110.000.000	200	185.000.000	200	185.000.000	240	258.000.000	280	316.000.000		
8.01.04.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				90.000.000		120.000.000		120.000.000		160.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	200	100	90.000.000	120	120.000.000	120	120.000.000	140	160.000.000	160	210.000.000		
8.01.04.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				93.919.313		128.232.858		128.232.858		144.609.158		180.531.799		
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	4	4	93.919.313	4	128.232.858	4	128.232.858	4	144.609.158	4	180.531.799		

8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				339.240.000		366.379.200		366.379.200		451.024.780		610.063.422		
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Nilai Aspek Kesetaraan (Nilai)	74,78	78	339.240.000	80	366.379.200	82	366.379.200	84	451.024.780	84,2	610.063.422	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	60	65		73,75		82,5		91,25		100			
8.01.05.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				339.240.000		366.379.200		366.379.200		451.024.780		610.063.422		
Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	200	220	339.240.000	230	366.379.200	230	366.379.200	240	451.024.780	340	610.063.422		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	200	100		120		120		140		160			
8.01.05.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				140.000.000		150.000.000		150.000.000		180.000.000		260.000.000		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	200	220	140.000.000	230	150.000.000	230	150.000.000	240	180.000.000	340	260.000.000		

8.01.05.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				89.000.000		95.000.000		95.000.000		120.000.000		180.000.000		
Tertaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	200	100	89.000.000	120	95.000.000	120	95.000.000	140	120.000.000	160	180.000.000		
8.01.05.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				110.240.000		121.379.200		121.379.200		151.024.780		170.063.422		
Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	4	4	110.240.000	4	121.379.200	4	121.379.200	4	151.024.780	4	170.063.422		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				859.329.313		928.075.658		928.075.658		993.040.954		1.062.553.821		
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Yang Diselesaikan	Nilai Aspek Kebebasan (Nilai)	87,11	88,75	29.313	859.3	658	928.075.	658	928.075.	4	993.040.95	21	1.062.553.8	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	80	84		86		88		90		90			
8.01.06.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				859.329.313		928.075.658		928.075.658		993.040.954		1.062.553.821		
Jumlah Dokumen Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	130	75	859.329.313		928.075.658		928.075.658		993.040.954		1.062.553.821		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	150	200		250		250		300		350			
8.01.06.1.01.0001 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				15.065.862		18.075.658		18.075.658		20.000.000		30.000.000		
Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	0	1	15.065.862	1	18.075.658	1	18.075.658	1	20.000.000	1	30.000.000		

8.01.06.1.01.0002 - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50.065.862		60.000.000		60.000.000		68.040.954		72.553.821		
Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	1	1	50.065.862	1	60.000.000	1	60.000.000	1	68.040.954	1	72.553.821		
8.01.06.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				74.065.862		80.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	130	75	74.065.862	80	80.000.000	80	80.000.000	90	85.000.000	100	90.000.000		
8.01.06.1.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				170.065.862		180.000.000		180.000.000		190.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	150	200	170.065.862	250	180.000.000	250	180.000.000	300	190.000.000	350	200.000.000		

8.01.06.1.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				150.065.865		170.000.000		170.000.000		180.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	4	4	150.065.865	4	170.000.000	4	170.000.000	4	180.000.000	4	200.000.000		
8.01.06.1.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				400.000.000		420.000.000		420.000.000		450.000.000		470.000.000		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	400.000.000	1	420.000.000	1	420.000.000	1	450.000.000	1	470.000.000		

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulteng

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik bertujuan untuk memberikan gambaran yang terukur mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, kolaboratif, serta keamanan daerah yang tangguh. Indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dirumuskan untuk mengukur efektivitas hasil (outcome) dari setiap program strategis yang dilaksanakan, baik dalam penguatan ideologi Pancasila, peningkatan ketahanan nasional, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, maupun pengembangan kapasitas lembaga demokrasi. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kebijakan dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan stabilitas sosial politik, partisipasi masyarakat, serta kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara teknis indikator kinerja penyelenggaraan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup dua tingkatan, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan hasil kinerja strategis lembaga dalam mendukung capaian tujuan pembangunan daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan kinerja operasional dari pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Kedua indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2025–2029.

A. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan ukuran keberhasilan utama dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029. Indikator Kinerja Utama berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja lembaga dalam rangka memastikan ketercapaian tujuan pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–

2029. Penetapan Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan relevansi antara sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program serta kegiatan prioritas. Dengan demikian, pencapaian target Indikator Kinerja Utama menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 secara menyeluruh. Berikut penetapan target Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULTENG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah									
2.	Nilai Aspek Kesenjangan	Nilai	74,78	76,50	78,00	80,00	82,00	84,00	84,20	
3.	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Nilai	76,48	77,50	78,50	79,50	81,00	83,00	83,30	
4.	Nilai Aspek Kebebasan	Nilai	87,11	88,00	88,75	89,50	90,25	91,00	91,10	

B. Target Keberhasilan Pencapaian Sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersifat lebih operasional dan spesifik dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Kunci berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci disusun berdasarkan hasil analisis keterkaitan antara sasaran strategis perangkat daerah dengan indikator kinerja program serta memperhatikan keselarasan dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Melalui Indikator Kinerja Kunci ini, diharapkan dapat terlihat secara konkret capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan kebebasan, kesetaraan, dan peningkatan kapasitas lembaga demokrasi yang menjadi tujuan utama Renstra periode 2025–2029.

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROV. SULTENG

N O	INDIKATOR	SATUA N	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Demokrasi Provinsi	Indeks	79,13	80 - 81	80,5 - 81,31	80,9 - 81,62	81,0 - 81,93	82,24 -85,49	82,55 - 85,9	
2	Nilai Aspek Kebebasan	Nilai	87,11	88,00	88,75	89,50	90,25	91,00	91,10	
3	Nilai Aspek Kesenjangan	Nilai	74,78	76,50	78,00	80,00	82,00	84,00	84,20	
4	Nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Nilai	76,48	77,50	78,50	79,50	81,00	83,00	83,30	
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	80	82	84	86	88	90	90	

BAB V

PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima Tahun ke depan dan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi, dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah secara khusus dan kondisi, situasi, dan potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

Hasil pelaksanaan dari Renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada akhir Tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Selanjutnya Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang setiap Tahunnya akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan upaya-upaya pembangunan di Bidang kesatuan bangsa dan politik akan semakin terarah dan meningkat, dalam mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Kedepannya, diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara umum.